

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. KERANGKA TEORI/KONSEP

##### 1.1. *Teori Stakeholder*

*Stakeholder* adalah individu maupun kelompok yang dipengaruhi atau mempengaruhi sebuah organisasi baik secara keseluruhan atau tiap bagian dalam perusahaan. Pada mulanya, pemegang saham dianggap satu-satunya *stakeholder* dalam sebuah perusahaan. Namun, pandangan ini disempurnakan oleh Ghazali dan Chariri (2007:409) dalam Fahrizqi (2010), yang menyatakan bahwa Teori *Stakeholder* merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan pemegang saham, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh *stakeholder*-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Hal ini sejalan dengan pendapat Gray, at.al., (1997: 53) dalam Fahrizqi (2010) yang mengatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder* dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Jadi, teori ini menjelaskan mengenai pentingnya perusahaan untuk memuaskan keinginan para stakeholdernya

##### 1.2. *Teori legitimasi*

Legitimasi adalah seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin. Sehingga legitimasi memiliki manfaat untuk mendukung keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Harahap (2014) menyatakan bahwa masyarakat merupakan faktor yang penting dalam keberlangsungan perusahaan. Oleh karena itu, Teori legitimasi berguna



untuk menegaskan bahwa perusahaan terus berupaya untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dalam bingkai dan norma yang ada dalam masyarakat atau lingkungan dimana perusahaan berada. Perusahaan juga berusaha untuk memastikan bahwa aktifitas mereka (perusahaan) diterima oleh masyarakat sebagai suatu yang “sah” (Deegan, 2004 dalam Fernanda, 2016).

Berdasarkan Teori Legitimasi maka perusahaan berusaha untuk terus mempertahankan kepercayaan masyarakat, pemerintah, maupun pihak lain yang berkepentingan dengan cara menerbitkan laporan tahunan perusahaan dan laporan keberlanjutan dalam rangka untuk menarik simpati dan membentuk citra yang baik dimata masyarakat luas.

### **1.3. Tata Kelola Perusahaan**

Menurut *Forum Corporate Governance on Indonesia (FCGI)*, Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance, CG*) adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah (*value added*) bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Penerapan konsep *CG* diharapkan memberikan kepercayaan terhadap agen (manajemen) dalam mengelola kekayaan pemilik (pemegang saham), dan pemilik menjadi lebih yakin bahwa agen tidak akan melakukan suatu kecurangan untuk kesejahteraan agen sehingga dapat meminimumkan konflik kepentingan dan meminimumkan biaya keagenan. Dengan begitu, biaya keagenan akan dapat dialokasikan untuk membangun *image* perusahaan menjadi lebih baik dan memberikan timbal balik yang baik juga.



Terdapat 5 Prinsip dalam Tata Kelola Perusahaan agar dapat dikatakan bahwa perusahaan telah berhasil menerapkan *GCG*. Menurut POJK No. 2 tahun 2014, pasal 2 menjelaskan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik meliputi:

1. *Transparancy* (Transparansi)

Transparansi berfungsi untuk mempertahankan *objektivitas* dalam menjalankan bisnis. Perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan, baik untuk memenuhi kewajiban yang telah diatur oleh pemerintah maupun yang berguna bagi pemegang saham dalam mengambil keputusan. Informasi ini harus mudah didapat dan dipahami oleh semua kalangan terutama bagi pihak-pihak yang berpengaruh langsung dalam pembuatan kebijakan atau pengambil keputusan.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

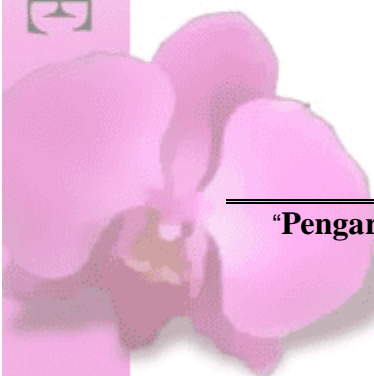
Akuntabilitas menekankan pada pentingnya penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara komisaris, direksi, dan pemegang saham yang meliputi pengawasan, evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

*Responsibility* adalah adanya tanggung jawab perusahaan untuk melakukan kinerja sosialnya terhadap masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercipta kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

4. *Independent* (Independensi)

Untuk melancarkan asas *Corporate Governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat *diintervensi* oleh pihak lain. Independen diperlukan untuk



menghindari adanya potensi konflik kepentingan sehingga pengambilan keputusan tidak dilakukan secara obyektif. Sehingga, setiap bagian dalam perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya masing-masing sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

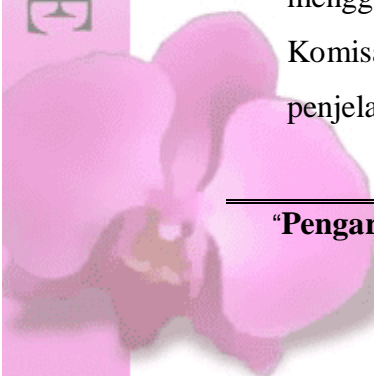
5. *Fairness* (Kewajaran/Kesetaraan)

Prinsip kewajaran/kesetaraan merupakan prinsip perlakuan yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan bagi perusahaan. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama bagi para pemegang saham dalam menyampaikan masukan atau pendapat mereka untuk kepentingan perusahaan, serta tidak membedakan agama, ras maupun suku dalam hal perekrutan karyawan dan bekerja secara profesional dalam bidangnya masing-masing.

Menurut Effendi (2016) penerapan prinsip-prinsip *GCG* bertujuan untuk:

1. Mengoptimalkan nilai perusahaan dan mempunyai daya saing yang kuat secara nasional dan internasional
2. Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, efisien, dan efektif.
3. Mendorong Organ dalam perusahaan untuk mengambil keputusan yang bermoral tinggi dan sesuai dengan peraturan pemerintah
4. Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Dalam penelitian ini, Sistem Tata Kelola Perusahaan akan diukur dengan menggunakan pengukuran 1) Kepemilikan Institusional, 2) Rapat Dewan Komisaris 3) Dewan Komisaris Independen 4) Komite Audit. Untuk penjelasan dari beberapa indikator diatas dapat dilihat dibawah ini:



### 1. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham oleh institusi keuangan maupun non keuangan. Kepemilikan institusional ini dapat dijadikan pengukuran dalam penilaian *GCG* karena kepemilikan institusional dapat memonitor kinerja manajemen dalam pengambilan keputusan serta mampu meminimalkan kesalahpahaman antara pemegang saham dan manajer. Selain itu, dengan adanya kepemilikan institusional yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain akan dapat memonitor kinerja manajemen secara optimal sehingga diharapkan akan berpengaruh terhadap kinerja agen dalam mengelola perusahaan. Sehingga Kepemilikan Institusional (KI) akan diukur dengan cara sebagai berikut:

$$KI = \frac{\text{Kepemilikan Institusional}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

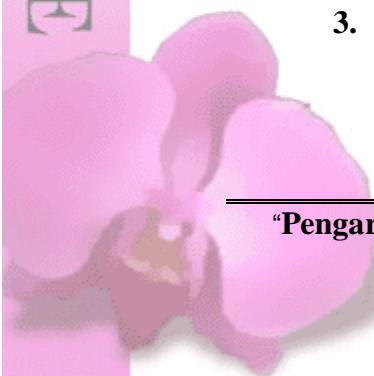
### 2. Aktifitas Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah dewan yang berwenang untuk memastikan bahwa visi dan misi serta konsep *GCG* perusahaan telah diimplementasikan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dalam memonitor hal tersebut maka rapat dewan komisaris sangat dibutuhkan untuk membuat strategi atau kebijakan dalam operasional perusahaan. Oleh karena itu, diharapkan semakin sering dewan komisaris dalam menyelenggarakan rapat maka keefektifan penerapan *GCG* semakin tinggi. Oleh karena itu Aktifitas Dewan Komisaris (ADK) diukur dengan :

$$ADK = \text{Rapat internal dewan komisaris 1 periode}$$

### 3. Dewan Komisaris Independen

Dewan Komisaris Independen adalah Dewan Komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan telah memenuhi persyaratan perusahaan.



Dalam perusahaan terdapat beberapa permasalahan yang salah satunya adalah peran CEO yang mendominasi perusahaan dibandingkan dengan Dewan Komisaris. Padahal peran Dewan Komisaris dalam perusahaan adalah mengawasi kinerja dewan direksi yang dipimpin oleh CEO. Oleh karena itu adanya Komisaris independen diharapkan mampu menjadi bagian dari perusahaan yang dapat melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja perusahaan dan mampu melaksanakan sistem *GCG*.

Dewan Komisaris Independen (DKI) akan diukur dengan cara sebagai berikut:

$$DKI = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

#### 4. Komite Audit

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris yang bertugas untuk mengawasi laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan agar tidak terjadi manajemen laba selain itu komite audit juga mempunyai tugas untuk mengawasi kinerja audit internal maupun audit eksternal, dimana audit eksternal ini direkomendasikan oleh komite audit dalam rapat umum pemegang saham. Dengan adanya Komite Audit diharapkan perusahaan dapat membuat laporan keuangan dengan baik dan benar tanpa adanya indikasi adanya manajemen laba. Oleh karena itu, dengan adanya komite audit yang independen dan dapat bekerja secara optimal akan membantu perusahaan dapat melaksanakan *GCG* secara lebih baik lagi.

Komite audit (KA) dapat diukur dengan cara sebagai berikut:

$$KA = \text{Jumlah anggota komite audit}$$

#### 1.4. Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*)

Dalam menjalankan sebuah kegiatan bisnis, maka sudah selayaknya sebuah perusahaan menjaga keberlangsungan aktivitas dan operasi perusahaannya. Konsep tersebut sejalan dengan tujuan pembuatan pedoman Laporan Keberlanjutan (*SR*) oleh *Global Reporting Initiative (GRI)* yakni agar perusahaan dapat membuat laporan secara lebih terperinci mengenai pengungkapan kinerja dalam bidang ekonomi, sosial dan lingkungan kepada semua pihak yang berkepentingan. Meskipun pembuatan Laporan Keberlanjutan masih bersifat *volunter*, tetapi sebagian besar perusahaan bersedia untuk membuat laporan tersebut karena masyarakat, pemegang saham, kreditur maupun pemerintah mulai sadar bahwa terdapat dampak yang ditimbulkan perusahaan dalam kegiatan operasionalnya baik dalam bidang ekonomi, sosial atau lingkungannya. Sehingga, untuk mempertanggungjawabkan dampak tersebut, banyak perusahaan yang mulai menerbitkan Laporan Keberlanjutan demi keberlangsungan kehidupan perusahaan dan citra perusahaan dimata *stakeholdernya*.

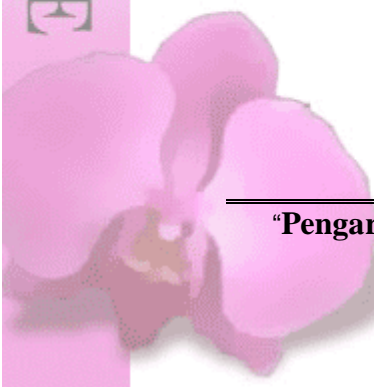
Terdapat beberapa aspek dan kategori dalam Laporan Keberlanjutan, yakni (*Global Reporting Initiative, G-4*):

##### 1. Ekonomi

Dalam kategori ekonomi terdapat beberapa aspek, yakni: kinerja ekonomi, keberadaan di pasar, dampak ekonomi tidak langsung, dan praktik pengadaan.

##### 2. Lingkungan

Dalam kategori lingkungan terdapat beberapa aspek, yakni: bahan, energi, air, keaneragaman hayati, emisi, efluen dan limbah, produk dan jasa, kepatuhan, transportasi, lain-lain, asesmen pemasok dan lingkungan, dan mekanisme pengaduan masalah lingkungan



### 3. Sosial

Dalam kategori sosial terdapat beberapa sub-kategori di dalamnya, yakni: Praktik Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja, Hak Asasi Manusia, Masyarakat, dan Kinerja atas Produk. Dalam sub-kategori ini akan diuraikan lagi menjadi beberapa aspek.

#### 1.5. *Pengungkapan Kinerja Sosial*

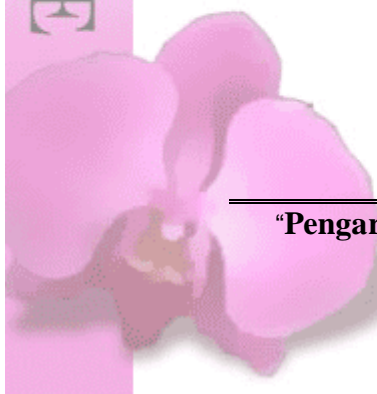
Konsep Laporan Keberlanjutan (*SR*) sering dipersepsikan sama dengan kinerja sosial oleh sebagian masyarakat maupun para investor. Sebenarnya persepsi ini tidak salah hanya saja masih kurang lengkap. Menurut Solihin (2015) kinerja sosial perusahaan merupakan salah satu dari beberapa kinerja perusahaan kepada para pemangku kepentingan (*Stakeholder*). Dalam *SR* terdapat pengungkapan kinerja dalam aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Dalam penelitian ini peneliti hanya akan membahas mengenai pengungkapan kinerja sosial yang merupakan bagian dari Laporan Keberlanjutan. Peneliti hanya akan membahas pengungkapan kinerja sosial karena kinerja sosial merupakan kegiatan yang berkaitan langsung dengan masyarakat dan karyawan dalam perusahaan yang memungkinkan perusahaan untuk membentuk sebuah citra yang baik sebagaimana tujuan dibuatnya laporan keberlanjutan.

Pengungkapan Kinerja Sosial memiliki sub-Kategori yang didalamnya akan dibagi lagi menjadi beberapa aspek. Sub-kategori dalam Pengungkapan Kinerja Sosial terdiri dari :

##### 1. Praktik Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja

Dalam sub kategori ini ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja perusahaan harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan secara *universal* baik oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun Organisasi Buruh Internasional (ILO). Perusahaan





harus mengungkapkan berbagai aspek dan indikator ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja seperti (1) Aspek Kepegawaian (2) Aspek Hubungan Industrial (3) Aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (4) Aspek Pelatihan dan Pendidikan dll.

## 2. Hak Asasi Manusia

Indikator Kinerja Hak Asasi Manusia menentukan bahwa organisasi harus melaporkan sejauh mana hak asasi manusia diperhitungkan dalam investasi dan praktek pemilihan supplier/kontraktor. Sebagai tambahan, Indikator ini meliputi pelatihan mengenai hak asasi manusia bagi karyawan dan aparat keamanan, sebagaimana juga bagi nondiskriminasi, kebebasan berserikat, tenaga kerja anak, hak adat, serta kerja paksa, dan kerja wajib.

## 3. Masyarakat

Indikator Kinerja Masyarakat membahas tentang dampak yang dimiliki perusahaan terhadap masyarakat sekitar perusahaan termasuk aspek anti-korupsi, aspek kebijakan publik, aspek kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang yang berlaku, aspek penampisan pemasok baru yang berdampak buruk bagi masyarakat hingga aspek pengaduan masyarakat terhadap dampak yang telah ditimbulkan oleh perusahaan.

## 4. Kinerja atas Produk

Indikator Kinerja Tanggung Jawab Produk membahas aspek produk dari organisasi pelapor dan jasa yang diberikan yang mempengaruhi pelanggan, terutama, kesehatan dan keselamatan, informasi dan pelabelan, pemasaran, dan privasi.

Beberapa Sub-kategori diatas memiliki beberapa indikator. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1 Pengungkapan Kinerja Sosial**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SUB-KATEGORI: PRAKTIK KETENAGAKERJAAN DAN KENYAMANAN BEKERJA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Aspek: Kepegawaian</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>LA1</b> JUMLAH TOTAL DAN TINGKAT PEREKRUTAN KARYAWAN BARU DAN TURNOVER KARYAWAN MENURUT KELOMPOK UMUR, GENDER, DAN WILAYAH</li> <li><b>LA2</b> TUNJANGAN YANG DIBERIKAN BAGI KARYAWAN PURNAWAKTU YANG TIDAK DIBERIKAN BAGI KARYAWAN SEMENTARA ATAU PARUH WAKTU, BERDASARKAN LOKASI OPERASI YANG SIGNIFIKAN</li> <li><b>LA3</b> TINGKAT KEMBALI BEKERJA DAN TINGKAT RETENSI SETELAH CUTI MELAHIRKAN, MENURUT GENDER</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Aspek: Hubungan Industrial</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>LA4</b> JANGKA WAKTU MINIMUM PEMBERITAHUAN MENGENAI PERUBAHAN OPERASIONAL, TERMASUK APAKAH HAL TERSEBUT TERCANTUM DALAM PERJANJIAN BERSAMA</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Aspek: Kesehatan dan Keselamatan Kerja</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>LA5</b> PERSENTASE TOTAL TENAGA KERJA YANG DIWAKILI DALAM KOMITE BERSAMA FORMAL MANAJEMEN-PEKERJA YANG MEMBANTU MENGAWASI DAN MEMBERIKAN SARAN PROGRAM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA</li> <li><b>LA6</b> JENIS DAN TINGKAT CEDERA, PENYAKIT AKIBAT KERJA, HARI HILANG, DAN KEMANGKIRAN, SERTA</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
--

JUMLAH TOTAL KEMATIAN AKIBAT KERJA, MENURUT DAERAH DAN GENDER

**LA7** PEKERJA YANG SERING TERKENA ATAU BERISIKO TINGGI TERKENA PENYAKIT YANG TERKAIT DENGAN PEKERJAAN MEREKA

**LA8** TOPIK KESEHATAN DAN KESELAMATAN YANG TERCAKUP DALAM PERJANJIAN FORMAL DENGAN SERIKAT PEKERJA

➤ **Aspek: Pelatihan dan Pendidikan**

**LA9** JAM PELATIHAN RATA-RATA PER TAHUN PER KARYAWAN MENURUT GENDER, DAN MENURUT KATEGORI KARYAWAN

**LA10** PROGRAM UNTUK MANAJEMEN KETERAMPILAN DAN PEMBELAJARAN SEUMUR HIDUP YANG MENDUKUNG KEBERLANJUTAN KERJA KARYAWAN DAN MEMBANTU MEREKA MENGELOLA PURNA BAKTI

**LA11** PERSENTASE KARYAWAN YANG MENERIMA REVIU KINERJA DAN PENGEMBANGAN KARIER SECARA REGULER, MENURUT GENDER DAN KATEGORI KARYAWAN

➤ **Aspek: Keberagaman dan Kesetaraan Peluang**

**LA12** KOMPOSISI BADAN TATA KELOLA DAN PEMBAGIAN KARYAWAN PER KATEGORI KARYAWAN MENURUT GENDER, KELOMPOK USIA, KEANGGOTAAN KELOMPOK MINORITAS, DAN INDIKATOR KEBERAGAMAN LAINNYA

➤ **Aspek: Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-laki**

**LA13** RASIO GAJI POKOK DAN REMUNERASI BAGI

PEREMPUAN TERHADAP LAKI-LAKI MENURUT KATEGORI KARYAWAN, BERDASARKAN LOKASI OPERASIONAL YANG SIGNIFIKAN

➤ **Aspek: Asesmen Pemasok atas Praktik Ketenagakerjaan**

**LA14** PERSENTASE PENAPISAN PEMASOK BARU MENGGUNAKAN KRITERIA PRAKTIK KETENAGAKERJAAN

**LA15** DAMPAK NEGATIF AKTUAL DAN POTENSIAL YANG SIGNIFIKAN TERHADAP PRAKTIK KETENAGAKERJAAN DALAM RANTAI PASOKAN DAN TINDAKAN YANG DIAMBIL

➤ **Aspek: Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan**

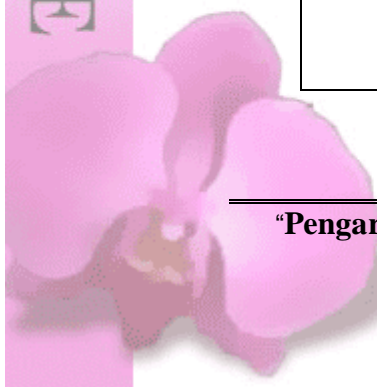
**LA16** JUMLAH PENGADUAN TENTANG PRAKTIK KETENAGAKERJAAN YANG DIAJUKAN, DITANGANI, DAN DISELESAIKAN MELALUI MEKANISME PENGADUAN RESMI

• **SUB-KATEGORI: HAK ASASI MANUSIA**

➤ **Aspek: Investasi**

**HR1** JUMLAH TOTAL DAN PERSENTASE PERJANJIAN DAN KONTRAK INVESTASI YANG SIGNIFIKAN YANG MENYERTAKAN KLAUSUL TERKAIT HAK ASASI MANUSIA ATAU PENAPISAN BERDASARKAN HAK ASASI MANUSIA

**HR2** JUMLAH WAKTU PELATIHAN KARYAWAN TENTANG KEBIJAKAN ATAU PROSEDUR HAK ASASI MANUSIA TERKAIT DENGAN ASPEK HAK ASASI MANUSIA YANG RELEVAN DENGAN OPERASI, TERMASUK PERSENTASE KARYAWAN YANG DILATIH



➤ **Aspek: Non-diskriminasi**

**HR3** JUMLAH TOTAL INSIDEN DISKRIMINASI DAN TINDAKAN PERBAIKAN YANG DIAMBIL

➤ **Aspek: Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama**

**HR4** OPERASI DAN PEMASOK TERIDENTIFIKASI YANG MUNGKIN MELANGGAR ATAU BERISIKO TINGGI MELANGGAR HAK UNTUK MELAKSANAKAN KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA, DAN TINDAKAN YANG DIAMBIL UNTUK Mendukung HAK-HAK TERSEBUT

➤ **Aspek: Pekerja Anak**

**HR5** OPERASI DAN PEMASOK YANG DIIDENTIFIKASI BERISIKO TINGGI MELAKUKAN EKSPLOITASI PEKERJA ANAK DAN TINDAKAN YANG DIAMBIL UNTUK BERKONTRIBUSI DALAM PENGHAPUSAN PEKERJA ANAK YANG EFEKTIF

➤ **Aspek: Pekerja Paksa atau Wajib Kerja**

**HR6** OPERASI DAN PEMASOK YANG DIIDENTIFIKASI BERISIKO TINGGI MELAKUKAN PEKERJA PAKSA ATAU WAJIB KERJA DAN TINDAKAN UNTUK BERKONTRIBUSI DALAM PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK PEKERJA PAKSA ATAU WAJIB KERJA

➤ **Aspek: Praktik Pengamanan**

**HR7** PERSENTASE PETUGAS PENGAMANAN YANG DILATIH DALAM KEBIJAKAN ATAU PROSEDUR HAK ASASI MANUSIA DI ORGANISASI YANG RELEVAN DENGAN OPERASI

➤ **Aspek: Hak Adat**

**HR8** JUMLAH TOTAL INSIDEN PELANGGARAN YANG MELIBATKAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DAN TINDAKAN YANG DIAMBIL

➤ **Aspek: Asesmen**

**HR9** JUMLAH TOTAL DAN PERSENTASE OPERASI YANG TELAH MELAKUKAN REVIU ATAU ASESMEN DAMPAK HAK ASASI MANUSIA

➤ **Aspek: Asesmen Pemasok atas Hak Asasi Manusia**

**HR10** PERSENTASE PENAPISAN PEMASOK BARU MENGGUNAKAN KRITERIA HAK ASASI MANUSIA

**HR11** DAMPAK NEGATIF AKTUAL DAN POTENSIAL YANG SIGNIFIKAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA DALAM RANTAI PASOKAN DAN TINDAKAN YANG DIAMBIL

➤ **Aspek: Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia**

**HR12** JUMLAH PENGADUAN TENTANG DAMPAK TERHADAP HAK ASASI MANUSIA YANG DIAJUKAN, DITANGANI, DAN DISELESAIKAN MELALUI MEKANISME PENGADUAN FORMAL

• **SUB-KATEGORI:MASYARAKAT**

➤ **Aspek: Masyarakat Lokal**

**SO1** PERSENTASE OPERASI DENGAN PELIBATAN MASYARAKAT LOKAL, ASESMEN DAMPAK, DAN PROGRAM PENGEMBANGAN YANG DITERAPKAN

**SO2** OPERASI DENGAN DAMPAK NEGATIF AKTUAL DAN POTENSIAL YANG SIGNIFIKAN TERHADAP MASYARAKAT LOKAL

➤ **Aspek: Anti-korupsi**

**SO3** JUMLAH TOTAL DAN PERSENTASE OPERASI YANG DINILAI TERHADAP RISIKO TERKAIT DENGAN KORUPSI DAN RISIKO SIGNIFIKAN YANG TERIDENTIFIKASI

**SO4** KOMUNIKASI DAN PELATIHAN MENGENAI KEBIJAKAN DAN PROSEDUR ANTI-KORUPSI

**SO5** INSIDEN KORUPSI YANG TERBUKTI DAN TINDAKAN YANG DIAMBIL

➤ **Aspek: Kebijakan Publik**

**SO6** NILAI TOTAL KONTRIBUSI POLITIK BERDASARKAN NEGARA DAN PENERIMA/PENERIMA MANFAAT

➤ **Aspek: Anti Persaingan**

**SO7** JUMLAH TOTAL TINDAKAN HUKUM TERKAIT ANTI PERSAINGAN, ANTI-TRUST, SERTA PRAKTIK MONOPOLI DAN HASILNYA

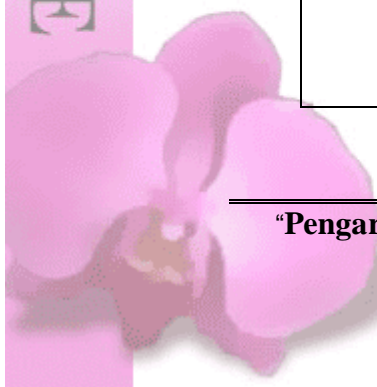
➤ **Aspek: Kepatuhan**

**SO8** NILAI MONETER DENDA YANG SIGNIFIKAN DAN JUMLAH TOTAL SANKSI NON-MONETER ATAS KETIDAKPATUHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

➤ **Aspek: Asesmen Pemasok atas Dampak pada Masyarakat**

**SO9** PERSENTASE PENAPISAN PEMASOK BARU MENGGUNAKAN KRITERIA DAMPAK TERHADAP MASYARAKAT

**SO10** DAMPAK NEGATIF AKTUAL DAN POTENSIAL YANG SIGNIFIKAN TERHADAP MASYARAKAT DALAM



RANTAI PASOKAN DAN TINDAKAN YANG DIAMBIL

➤ **Aspek: Mekanisme Pengaduan Dampak terhadap Masyarakat**

**SO11** JUMLAH PENGADUAN TENTANG DAMPAK TERHADAP MASYARAKAT YANG DIAJUKAN, DITANGANI, DAN DISELESAIKAN MELALUI MEKANISME PENGADUAN RESMI

• **SUB-KATEGORI: KINERJA ATAS PRODUK**

➤ **Aspek: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan**

**PR1** PERSENTASE KATEGORI PRODUK DAN JASA YANG SIGNIFIKAN YANG DAMPAKNYA TERHADAP KESEHATAN DAN KESELAMATAN YANG DINILAI UNTUK PENINGKATAN

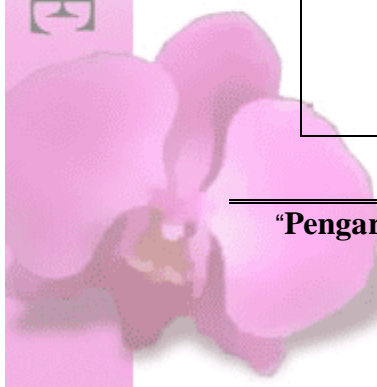
**PR2** TOTAL JUMLAH INSIDEN KETIDAKPATUHAN TERHADAP PERATURAN DAN KODA SUKARELA TERKAIT DAMPAK KESEHATAN DAN KESELAMATAN DARI PRODUK DAN JASA SEPANJANG DAUR HIDUP, MENURUT JENIS HASIL

➤ **Aspek: Pelabelan Produk dan Jasa**

**PR3** JENIS INFORMASI PRODUK DAN JASA YANG DIHARUSKAN OLEH PROSEDUR ORGANISASI TERKAIT DENGAN INFORMASI DAN PELABELAN PRODUK DAN JASA, SERTA PERSENTASE KATEGORI PRODUK DAN JASA YANG SIGNIFIKAN HARUS MENGIKUTI PERSYARATAN INFORMASI SEJENIS

**PR4** JUMLAH TOTAL INSIDEN KETIDAKPATUHAN TERHADAP PERATURAN DAN KODA SUKARELA TERKAIT DENGAN INFORMASI DAN PELABELAN PRODUK DAN JASA, MENURUT JENIS HASIL

**PR5** HASIL SURVEI UNTUK MENGUKUR KEPUASAN





## PELANGGAN

➤ **Aspek: Komunikasi Pemasaran**

**PR6** PENJUALAN PRODUK YANG DILARANG ATAU  
DISENGKETAKAN

**PR7** JUMLAH TOTAL INSIDEN KETIDAKPATUHAN  
TERHADAP PERATURAN DAN KODA SUKARELA  
TENTANG KOMUNIKASI PEMASARAN, TERMASUK  
IKLAN, PROMOSI, DAN SPONSOR, MENURUT JENIS  
HASIL

➤ **Aspek: Privasi Pelanggan**

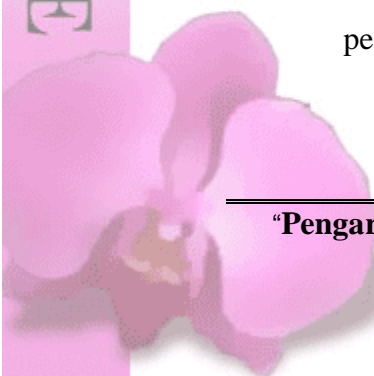
**PR8** JUMLAH TOTAL KELUHAN YANG TERBUKTI TERKAIT  
DENGAN PELANGGARAN PRIVASI PELANGGAN DAN  
HILANGNYA DATA PELANGGAN

➤ **Aspek: Kepatuhan**

**PR9** NILAI MONETER DENDA YANG SIGNIFIKAN ATAS  
KETIDAKPATUHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DAN  
PERATURAN TERKAIT PENYEDIAAN DAN  
PENGUNAAN PRODUK DAN JASA

Pengungkapan Kinerja Sosial akan diukur dengan menggunakan indeks pengungkapan. Indeks pengungkapan ini berdasarkan Panduan Laporan Keberlanjutan yang berasal dari *Global Reporting Initiative (GRI)* yang digunakan sebagai dasar perhitungan *Sustainability Report Disclosure Index (SRDI)*.

Perhitungan *SRDI* dilakukan dengan memberikan skor 1 jika satu item diungkapkan, dan 0 jika tidak diungkapkan. Setelah dilakukan pemberian skor pada seluruh item, skor tersebut kemudian



dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor untuk setiap perusahaan.

Formulasi untuk perhitungan *SRDI* adalah :

$$SDRI = \frac{n}{k}$$

Keterangan :

SRDI = *Sustainability Report Disclosure Index* perusahaan

n = jumlah item yang diungkapkan perusahaan

k = jumlah item yang diharapkan untuk diungkapkan

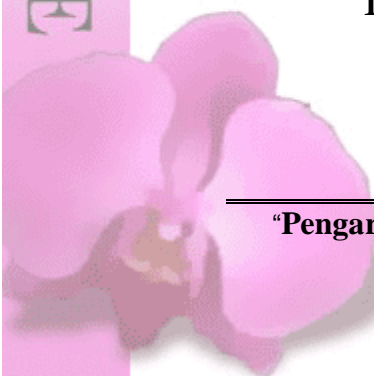
### 1.6. Kinerja Keuangan

Pada umumnya, para *stakeholder* menilai kesehatan perusahaan berdasarkan kinerja keuangan yang dibuat oleh perusahaan itu sendiri. Kinerja perusahaan tersebut biasanya dibuat dalam sebuah laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Laba-Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Kinerja keuangan sangat penting untuk perusahaan karena merupakan faktor utama yang menentukan *going concern* perusahaan. Oleh karena itu, para manajemen akan terus mengawasi kinerja keuangan perusahaan agar para manajemen dapat langsung melakukan perbaikan apabila terdapat masalah yang menyebabkan penurunan kinerja keuangan sebuah perusahaan.

Metode yang sering digunakan untuk menilai kinerja keuangan adalah dengan menghitung rasio keuangan. Rasio keuangan memiliki 4 kategori utama, yakni:

1. **Rasio Profitabilitas:** Seberapa bagus tingkat laba suatu perusahaan. Yang termasuk rasio ini:



- a. Profit Margin :  $\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$
- b. Gross Profit Margin :  $\frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$
- c. Net Profit Margin :  $\frac{\text{Laba bersih st.pajak}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$
- d. ROI :  $\frac{\text{Laba bersih st.pajak}}{\text{Investasi}} \times 100\%$
- e. ROA :  $\frac{\text{Laba sb. bunga dan pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$

2. **Rasio Aktivitas:** Mengukur efisiensi kegiatan perusahaan dan mengungkap peristiwa yang tersembunyi selama ini.

- a. Perputaran Piutang :  $\frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Rata-rata Piutang Dagang}}$
- b. Perputaran Persediaan :  $\frac{\text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Rata-rata persediaan}}$
- c. Perputaran Aktiva Tetap :  $\frac{\text{Penjualan}}{\text{Aktiva Tetap}}$
- d. Perputaran Total Aktiva :  $\frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aktiva}}$

3. **Rasio Solvabilitas:** Menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi segala kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dilikuidasi. Yang termasuk rasio ini:

- a. Debt Ratio :  $\frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$
- b. Debt to Equity Ratio :  $\frac{\text{Total Hutang}}{\text{Modal}} \times 100\%$

4. **Rasio Likuiditas:** Menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi utang jangka pendeknya. Yang termasuk rasio ini:

- a. Current Ratio :  $\frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$
- b. Quick Ratio :  $\frac{\text{Aktiva Lancar - Perseediaan}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$
- c. Cash Ratio :  $\frac{\text{Kas dan Setara Kas}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$

### 1.7. *Economic Value Added (EVA) Momentum*

Dari berbagai teori yang ada, terdapat banyak metode dalam pengukuran kinerja keuangan perusahaan. Rasio-rasio seperti ROE, ROA, ROCE, dan lain sebagainya, sangat populer digunakan untuk pengukuran kinerja keuangan perusahaan. Namun, ada juga alat ukur kinerja keuangan yang dinamakan Economic Value Added (EVA) Momentum. EVA Momentum merupakan rasio turunan EVA yang dibuat oleh Stewart pada tahun 2006.

EVA merupakan hasil perhitungan nilai ekonomis perusahaan yang realistis karena EVA dihitung berdasarkan kepentingan kreditur terutama para pemegang saham dan bukan berdasarkan nilai buku yang bersifat historis (Abdullah, 2003 dalam Anam, 2014). Namun, pengukuran EVA memiliki beberapa kekurangan, salah satunya adalah pengukuran EVA sangat bergantung pada transparansi internal perusahaan, yang dalam kenyataannya transparansi internal perusahaan masih sangat meragukan (Mirza & Imbuh, 1999 dalam Anam, 2014). Oleh karena itu EVA Momentum diciptakan untuk menyempurnakan pengukuran EVA dengan cara membagi perubahan EVA dengan penjualan periode sebelumnya. Dengan begitu, manajemen tidak bisa memanipulasi datanya karena rasio ini akan mengukur Nilai EVA dan Penjualan dari waktu ke waktu dan bila manajemen melakukan manipulasi pada periode tertentu maka akan mengalami kesulitan pada periode di masa yang akan datang.

Perhitungan EVA Momentum membutuhkan beberapa tahap. Berikut merupakan tahap perhitungan dari EVA Momentum menurut Tunggal (2001) dalam Khurin'in (2013):

#### 1. Rumus EVA Momentum

$$\text{EVA Momentum} = \frac{\text{EVA}_t - \text{EVA}_{(t-1)}}{\text{Penjualan periode sebelumnya}}$$

Keterangan:

EVA : Nilai tambah ekonomi (*Economic Value Added*)

$EVA_t$  : Nilai tambah ekonomi periode saat ini

$EVA_{(t-1)}$  : Nilai tambah ekonomi periode sebelumnya

## 2. Perhitungan EVA

$$EVA = NOPAT - (WACC \times IC)$$

Keterangan:

EVA : Nilai tambah ekonomi (*Economic Value Added*)

NOPAT : Laba operasi bersih setelah pajak (*Net Operating Profit After Taxes*)

WACC : Biaya modal rata-rata tertimbang (*Weighted Average Cost of Capital*)

IC : Modal yang diinvestasikan (*Investment Capital*)

## 3. Perhitungan NOPAT

$$NOPAT = EBIT (1-T)$$

Keterangan:

NOPAT : Laba operasi bersih setelah pajak (*Net Operating Profit After Taxes*)

EBIT : Laba sebelum pajak (Earning before Interest and Taxes)

T : Tarif pajak (Tax)

## 4. Perhitungan WACC

$$WACC = [(D \times rd) (1-T) + (E \times re)]$$

$$D = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Hutang dan Ekuitas}} \times 100\%$$

$$Rd = \frac{\text{Beban Bunga}}{\text{Total Hutang}} \times 100\%$$



$$E = \frac{\text{Total Ekuitas}}{\text{Total Hutang dan Ekuitas}} \times 100\%$$

$$Re = \frac{\text{Laba bersih st.Pajak}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

$$\text{Tax} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Bersih sb.Pajak}} \times 100\%$$

Keterangan:

WACC : Biaya modal rata-rata tertimbang (*Weighted Average Cost of Capital*)

D : Tingkat Modal

Rd : Cost of Debt

E : Tingkat Modal dan Ekuitas

Re : *Cost of Equity* (Biaya Modal)

Tax : Tingkat Pajak

## 5. Perhitungan IC

IC = Utang jangka panjang + total ekuitas

Keterangan:

IC : Modal yang diinvestasikan (*Investment Capital*)

## 2. PENELITIAN TERDAHULU

Tabel 2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Kesimpulan
1.	Ruly Rasaningrum (2016)	Pengaruh Kinerja Sosial dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Nilai	Variabel bebas: Tata kelola perusahaan diukur dengan dewan komisaris, dewan	Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa pengungkapan tanggung jawab

**“Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan dengan Pengungkapan Kinerja Sosial sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada perusahaan yang terdaftar di BEI)”**

Author: Elyka Annelies Suprayuto NPK: A.2013.1.32225

		Perusahaan	<p>komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan kualitas audit.</p> <p>Pengungkapan kinerja sosial diukur dengan menggunakan indeks dari <i>Global Reporting Initiative</i>.</p> <p>Variabel Terikat:</p> <p>Nilai Perusahaan diukur dengan Tobin's Q</p> <p>Variabel Kontrol:</p> <p>Umur perusahaan (age), Pertumbuhan penjualan (sales growth), Ukuran perusahaan (size)</p>	<p>sosial, dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh</p> <p>positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan ukuran dewan komisaris dan komite audit berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Variabel kualitas audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Pengujian atas variabel kontrol menunjukkan hasil bahwa umur perusahaan memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, sementara variabel pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh.</p>
--	--	------------	--	--

2.	Yohanes Kurniawan Susanto dan Josua Tarigan (2013)	Pengaruh pengungkapan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan	<p>Variabel bebas: kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial (Sub sektor : Praktik Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja, Hak Asasi Manusia, Masyarakat, dan Kinerja atas Produk perusahaan yang diukur dengan menggunakan indeks pengungkapan.</p> <p>Variabel terikat: kinerja keuangan perusahaan diukur dengan Return on Asset (ROA)</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, kinerja sosial (Sub sektor : Praktik Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja, dan hak asasi manusia) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Kinerja sosial (sub sektor: tanggung jawab produk) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Kinerja sosial (sub sektor : masyarakat) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.</p>
3.	Eka Hardikasari (2011)	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan pada sektor perbankan	<p>Variabel bebas: Tata Kelola Perusahaan diukur dengan ukuran dewan direksi dan ukuran dewan komisaris</p> <p>Variabel terikat: Kinerja keuangan perusahaan diukur dengan <i>Cash Flow Return on Asset</i></p> <p>Variabel control: Ukuran perusahaan</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, sedangkan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.</p>

**“Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan dengan Pengungkapan Kinerja Sosial sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada perusahaan yang terdaftar di BEI)”**

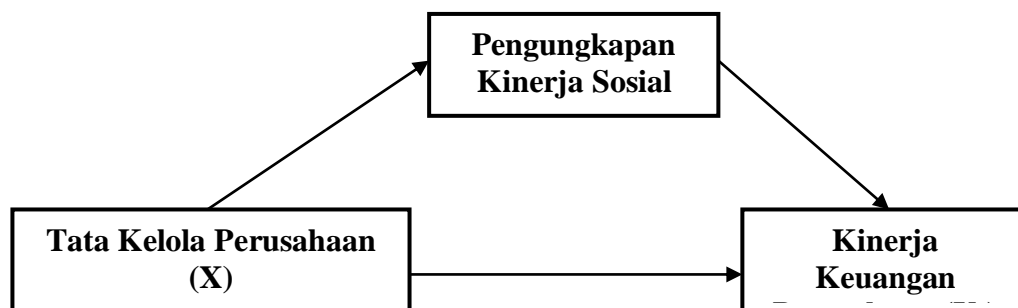
Author: Elyka Annelies Suprayuto NPK: A.2013.1.32225



4.	Tri Purwani (2010)	Pengaruh Good Corporate Governance (CGG) terhadap kinerja perusahaan	Variabel bebas: GCG diukur dengan data CGPI  Variabel terikat: kinerja keuangan diukur dengan EVA Momentum	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada dampak positif langsung GCG implementasi untuk kinerja perusahaan karena dipengaruhi oleh beberapa fakto
----	--------------------	--	--	---

### 3. KERANGKA PIKIR PENELITIAN

Dari penelitian terdahulu, terlihat bahwa Pengungkapan Kinerja Sosial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Susanto dan Tarigandan, 2013) dan Tata Kelola Perusahaan pun juga berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan (Finanda, 2016). Sedangkan, Pengungkapan Kinerja Sosial merupakan implimentasi dari konsep Tata Kelola Perusahaan yang baik. Sehingga, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana sistem Tata Kelola Perusahaan yang melakukan Pengungkapan Kinerja Sosial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. Kinerja Keuangan akan diukur menggunakan EVA Momentum karena EVA Momentum merupakan rasio keuangan yang sangat efektif untuk mengukur kinerja perusahaan, dimana telah dijelaskan bahwa dalam rasio ini perusahaan akan mengalami kesulitan dalam melakukan manipulasi data. Oleh karena itu, dapat digambarkan kerangka berpikir seperti gambar berikut:



Gambar 1 Kerangka Berpikir Penelitian

#### 4. PENGEMBANGAN HIPOTESIS

##### a. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Pengungkapan Kinerja Sosial.

Tata Kelola Perusahaan merupakan konsep yang berfungsi sebagai penyeimbang antar pihak pemangku kepentingan, sehingga pihak yang berkuasa tidak menggunakan kekuasaan mereka secara berlebihan, dan merugikan kepentingan pihak lain yang berada pada posisi relatif lemah. Maupun sebaliknya, pihak yang berada di posisi yang relative lemah tidak menggunakan wewenangnya untuk kepentingan diri sendiri. Isu mengenai *Corporate Governance (CG)* mulai menjadi pembahasan yang penting, khususnya di Indonesia, yaitu setelah Indonesia mengalami masa krisis yang berkepanjangan sejak tahun 1997. Sejak saat itu, baik pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek *Corporate Governance*. Dalam hal ini *Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai susunan aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan dan stakeholder internal dan eksternal yang lain sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya.

Menurut Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2012, apabila sebuah perusahaan melaksanakan sistem *CG* yang sesuai dengan prinsip dasarnya maka perusahaan tersebut akan semakin transparan dalam melakukan pengungkapan Kinerja Sosialnya. Prinsip-prinsip dasar dari penerapan *CG* yakni Transparan, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, independen, dan Keadilan.

**H1 : Tata Kelola Perusahaan berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Kinerja Sosial.**



**b. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Pengungkapan Kinerja Sosial terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan**

Praktik dalam pengungkapan Tanggung Jawab Sosial perusahaan merupakan konsekuensi logis dari implementasi konsep Tata Kelola Perusahaan. Karena tujuan dari Tata Kelola Perusahaan adalah untuk membangun citra perusahaan di mata pemegang saham, masyarakat, karyawan, pemerintah dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat dicapai dengan cara mengungkapkan Kinerja Sosial Perusahaan.

Keberhasilan dari penerapan Tata Kelola Perusahaan dan Pengungkapan Kinerja Sosial salah satunya dapat dilihat dari rasio Kinerja Keuangan Perusahaannya. Menurut penelitian Khomsiyah (2005) dalam Asba (2009) menyimpulkan bahwa CG berpengaruh terhadap kinerja operasional perusahaan. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan peneliti-peneliti sebelumnya bahwa apabila perusahaan memiliki citra yang baik dimata pemegang saham, masyarakat, kreditur maupun pihak yang berkepentingan lainnya, maka kegiatan perusahaan akan dapat berlanjut secara berkesinambungan dalam waktu yang panjang.

**H2 : Tata Kelola Perusahaan dan Pengungkapan Kinerja Sosial berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan**